

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di awal tahun 2020 dunia di hebohkan dengan sebuah kemunculan masalah kesehatan dunia. Badan Kesehatan dunia atau World Health Organization menyebutkan adanya kluster virus baru yang menyebar di kota Wuhan China. Sampai akhirnya WHO menetapkan Covid-19 sebagai kedaruratan global pada bidang kesehatan dan ditetapkan sebagai pandemi. Melansir pada media massa kompas.com bahwa Covid-19 sendiri masuk Indonesia pada pertengahan bulan Maret 2020 dengan jumlah 2 kasus, akhirnya WHO Menetapkan Coronavirus sebagai Pandemi.

Pandemi menyebabkan dampak yang luar biasa di dunia termasuk juga Indonesia, banyak sektor yang terdampak karena adanya pandemi tersebut. Pandemi yang terjadi berdampak di berbagai sektor, yang terparah pada sektor kesehatan, namun juga banyak sektor yang terdampak adanya pandemi Covid-19 diantaranya sosial dan ekonomi. Pada sektor kesehatan berdampak pada jumlah angka kematian yang terus meningkat dari sebelum adanya pandemi. Ilpaj & Nurwati (2020) mengatakan bahwa banyaknya jumlah kematian yang bertambah hari demi hari akibat virus corona ini menyebabkan banyak masyarakat mengalami ketakutan akan hal tersebut sehingga membuat masyarakat mengalami penurunan kesehatan mental. Dengan kesehatan mental yang terganggu akan mengakibatkan berbagai macam penyakit sangat mudah menyerang kesehatan

manusia, karena dengan kesehatan mental yang terganggu, masyarakat akan lebih mudah panik, cemas, dan juga stress.

Selain dampak tersebut adanya pandemi ini juga berdampak pada segi kehidupan sosial masyarakat, sebagaimana yang dikatakan Syahputra dkk, (2020) bahwa beberapa hal kecil mulai dirasakan perubahannya oleh masyarakat, salah satu yang sangat dirasakan yaitu dalam hal kontak fisik dengan orang lain, dimasa pandemi ini masyarakat dilarang berinteraksi fisik dengan orang lain misalnya berjabat tangan. Selain enggan berjabat tangan, masyarakat pun menjaga jarak aman 1-2 meter dengan lawan bicara. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut terjadi dikarenakan kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan *physical distancing* mandiri untuk mengurangi angka penyebaran Covid-19.

Diterapkannya kebijakan tersebut membuat segala aktivitas sosial yang biasanya dilakukan masyarakat mengalami perubahan baik dari anak-anak sampai orang dewasa seperti halnya pemberlakuan jam malam, pengurangan aktivitas yang mengakibatkan kerumunan atau orang banyak, penutupan berbagai tempat wisata, sekolah diliburkan dan dilakukan pembelajaran daring, bekerja jarak jauh di rumah (Work From Home), wajib menggunakan masker dan hand sanitizer dan masih banyak lainnya. Pandemi ini membuat masyarakat harus bisa menyesuaikan cara kehidupan mereka dengan situasi yang sedang terjadi ini, pola pikir masyarakat juga harus bisa berubah seiring berjalannya waktu. sejalan dengan berjalannya kebijakan – kebijakan yang ada selama pandemi masyarakat mulai terbiasa dengan kehidupan di masa pandemi ini, sehingga lambat laun

masyarakat juga dapat menerima berbagai perubahan yang dilakukan guna mencegah dan menghambat penyebaran Covid-19.

Tidak hanya sektor kesehatan dan sosial saja yang terkena dampak dari pandemi covid-19, sektor ekonomi juga menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup serius. Akibat pandemi ini ekonomi masyarakat mengalami penurunan yang cukup serius, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan penurunan ekonomi diantaranya pemutusan hubungan kerja dan penurunan penyerapan tenaga kerja. Apabila hal ini tidak ditanggapi dengan serius maka akan terjadi ketidakstabilan ekonomi dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, serta akan terjadi kemiskinan antar generasi. Pandemi yang terjadi ini menekan ekonomi dari berbagai kalangan tidak terkecuali terhadap perekonomian desa, dikarenakan sekarang banyak masyarakat desa yang merantau ke kota untuk bekerja. Banyaknya Pemutusan hubungan kerja membuat banyak orang desa kembali ke desa karena tidak mempunyai pekerjaan, dengan begitu juga dapat menyebabkan penyebaran covid-19 di desa semakin luas.

Disektor lain yang juga terkena dampak dari pandemi adalah sektor pariwisata. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan destinasi wisata baik di kalangan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri, banyak orang luar negeri datang ke Indonesia untuk menikmati liburan. Syahputra dkk, (2020) menyebutkan berdasarkan data dari badan statistik nasional di tahun 2019 warga negara China merupakan salah satu negara dengan wisatawan asing terbanyak yang mengunjungi Indonesia dengan presentase

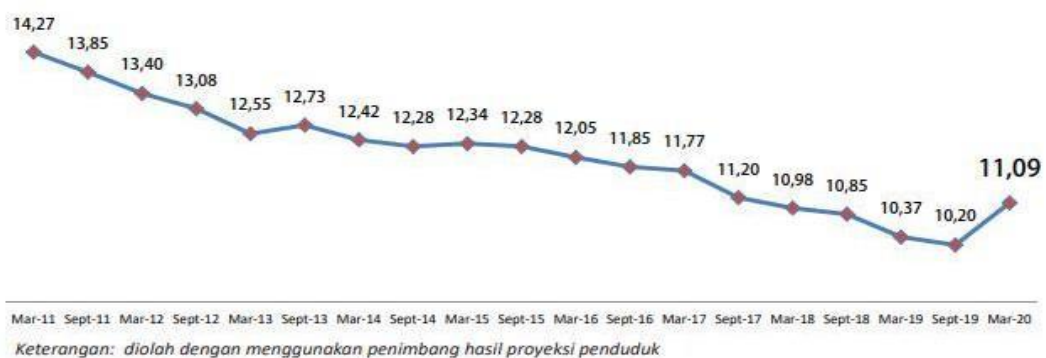
sebesar 12,8% wisatawan asing keseluruhan dengan angkat mencapai 2,07 juta wisatawan asing. Dengan adanya pandemi ini, jumlah wisatawan asing yang datang merosot sangat jauh dan bahkan hampir tidak ada wisatawan yang datang dikarenakan kebijakan setiap negara yang membatasi aktivitas keluar-masuk orang luar ke dalam dan ke luar negara mereka. Selain itu juga adanya kebijakan negara Indonesia yang menutup tempat wisata yang ada selama pandemi ini juga menjadi salah satu alasan mengapa menurunnya jumlah wisatawan asing yang mengunjungi Indonesia.

Perubahan – perubahan yang disebabkan pandemi Covid-19 membuat perekonomian Indonesia semakin kacau, hal tersebut juga berdampak kepada kehidupan masyarakat Indonesia, menurunnya pendapatan, hilangnya sumber mata pencaharian di berbagai sektor membuat masyarakat semakin kesulitan dalam perekonomian mereka. Hal tersebut membuat masyarakat kecil semakin susah dalam mengatur perekonomian mereka di masa pandemi Covid-19. Fenomena tersebut lantas membuat bertambahnya masyarakat miskin di Indonesia. Supriatna (1997:90) dalam Kadji (2004) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. Kemiskinan

juga didefinisikan sebagai standarisasi kehidupan yang rendah, namun secara umum kemiskinan merupakan fenomenan sosial yang terjadi akibat rendahnya pendapatan perkapita dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Kemiskinan dapat terjadi kepada semua negara dengan tingkatan dan jumlah orang miskin yang berbeda. Perbedaan tersebut berdasarkan tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang ada di daerah tersebut.

Gambar 1.1

Presentase Penduduk Miskin di Jawa Timur Tahun 2011-2020



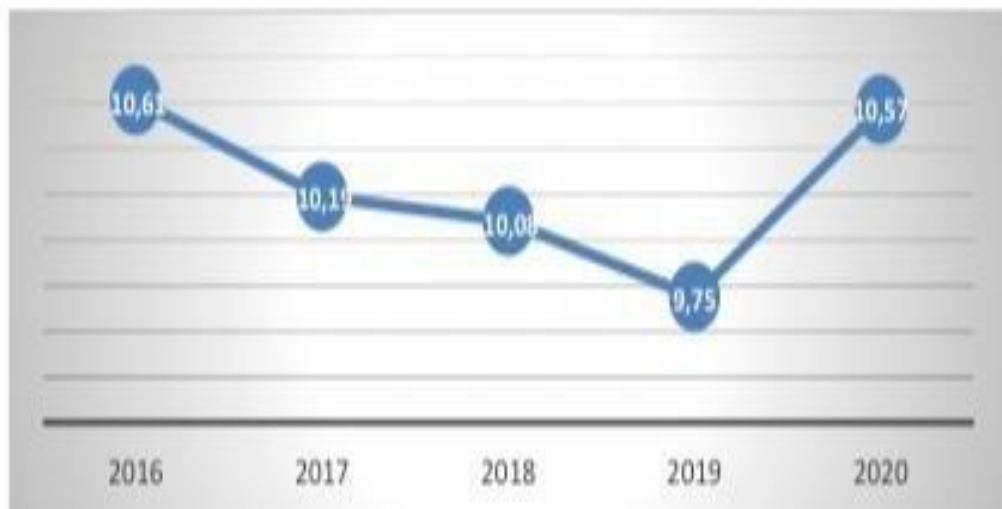
Sumber : *Badan Pusat Statistik Jawa Timur*, (Oktober 2020)

Berdasarkan tabel diatas, secara umum dapat dilihat bahwa maret 2011 – maret 2020 tingkat presentase kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan dari tahun ke tahun, kecuali pada bulan september 2013, maret 2015, dan maret 2020. Pada bulan september 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,18%, pada bulan maret 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,06% dan kenaikan tertinggi terjadi pada bulan maret 2020 yaitu sebesar 0,89% yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19.

Salah satu kabupaten yang terdampak di Jawa Timur adalah Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto sendiri mengalami peningkatan jumlah angka kemiskinan di tahun 2020 atau pada saat pandemi Covid-19, hal tersebut dibuktikan dari grafik yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik berikut:

Gambar 1.2.

Grafik penduduk miskin Kabupaten Mojokerto



Sumber: Badan Statistik Nasional (Oktober,2020)

Berdasarkan statistik diatas pada tahun 2016 - 2020 angka kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2016 – 2019, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 yang dimana pada tahun tersebut sedang terjadi pandemi Covid-19. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,42% , pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 0,08% , sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar 0,33% , namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar dengan nilai 0,82%.

Pemerintah Pusat dalam menangani hal ekonomi yang disebabkan adanya pandemi ini memberikan beberapa bantuan sosial, Dalam jurnal (Winarta

dkk, 2020) menjelaskan Bantuan Sosial Menurut Kementerian Sosial (2011:15) bantuan sosial adalah bantuan yang mempunyai sifat sementara untuk diberikan kepada masyarakat miskin, dengan tujuan agar masyarakat mampu meningkatkan kehidupannya secara wajar. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah diantaranya bantuan barang sembako, bantuan langsung tunai, bantuan langsung tunai dana desa, bantuan listrik gratis dan sebagainya. Dalam hal ini salah satu bantuan yang akan dikaji oleh penulis adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan sosial yang dianggarkan pemerintah melalui alokasi dana desa. Dalam jurnal (Nadira dkk, 2019) menjelaskan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN bahwa Dana Desa adalah anggaran yang didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukkan bagi keperluan desa untuk mengatur perekonomian desa dan juga kebutuhan desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 22/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan anggaran Dana Desa, aturan yang diterbitkan ini salah satu nya mengatur tentang besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dalam PMK sebelumnya BLT dana desa diberikan sekama sembilan bulan dengan besaran

masing-masing enam ratus ribu rupiah (600.000) untuk bulan pertama sampai bulan ketiga dan tiga ratus ribu rupiah (300.000) untuk bulan keempat sampai bulan kesembilan, sedangkan dalam PMK yang baru besaran BLT dana desa diberikan dalam jangka waktu 12 bulan dengan besaran tiga ratus ribu rupiah (300.000) per bulan. BLT Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, bantuan ini diberikan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin terdampak adanya Covid-19. Pemerintah dalam memberikan bantuan ini berharap dengan adanya bantuan tersebut masyarakat miskin atau masyarakat terdampak dapat membantu sedikit perekonomian mereka yang berkurang bahkan sampai kehilangan pendapatan akibat adanya pandemi Covid-19. Adapun syarat bagi masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai dana desa ini berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang terkena dampak Covid-19 yang berdomisi di desa bersangkutan, dan
2. Tidak sedang menerima bantuan lain yang diberikan pemerintah, misalkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah yang mulai melaksanakan kegiatan bantuan sosial yang di berikan pemerintah, satu per satu bantuan sosial mulai dijalankan mulai dari Program Keluarga Harapan, Bansos Pangan Sembako, BST, dan juga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

(BLT-DD). Data yang dilansir dalam artikel tribuna surabaya menyebutkan bahwa daftar penerima bantuan sosial di Kabupaten Mojokerto mencapai 123 ribu rumah tangga.

“masyarakat yang menerima bantuan sosial di Kabupaten Mojokerto sebanyak 123.707 keluarga yang terdaftar DTKS dengan rincian sebagai berikut; Program bantuan Keluarga Harapan sebanyak 32.116 KPM, Bansos Pangan Program Sembako 65.689 KPM. Kemudian, BST dari Unsur Rehsos 345 KPM, BST Kemensos sebanyak 46.599 KPM, BST APBD sekitar 16.445 KPM dan Jaring Pengaman Sosial Propinsi sebanyak 23.662 KPM”
<https://surabaya.tribunnews.com/2020/07/29/angka-kemiskinan-di-kabupaten-mojokerto-diprediksi-bertambah-akibat-pandemi-covid-19>
 (diakses pada 09 Maret 2021, pukul 13.05 WIB)

Setelah program perluasan sembako dan bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah pusat, kini giliran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa juga mulai disalurkan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto mulai menyalurkan BLT Dana Desa ke masyarakat, berdasarkan data yang dilansir oleh radar Mojokerto sekitar 27 ribu kepala keluarga dari 299 desa di Kabupaten Mojokerto mendapatkan bantuan tersebut, mereka adalah daftar calon penerima bantuan yang merupakan hasil dari usulan RT/RW yang disepakati oleh pemdes setempat.

Dari berbagai desa yang mendapatkan BLT Dana Desa salah satunya adalah Desa Pulorejo yang berada di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Desa Pulorejo sendiri memiliki jumlah masyarakat sebanyak 17637 kartu keluarga, banyak masyarakat desa Pulorejo yang terdampak dari segi ekonomi karena adanya pandemi Covid-19, mayoritas masyarakat di desa Pulorejo bekerja di sektor pertanian dan juga pekerja swasta. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di lokasi penelitian, adapun jumlah masyarakat

yang menerima bantuan langsung tunai dana desa berjumlah 85 kepala keluarga tiap bulannya, mereka adalah masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal di desa tersebut. mereka merupakan orang yang mendapat rekomendasi dari RT/RW tempat mereka tinggal yang kemudian akan diberikan kepada Kepala Dusun masing-masing untuk di lakukan verifikasi sebelum data tersebut di berikan ke pihak desa dan akan dilakukan verifikasi ulang sebelum nanti data tersebut di masukan ke pemerintah kabupaten setempat.

Dalam penyaluran BLT Dana Desa yang pertama terjadi beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah, salah satu masalah yang terjadi adalah telatnya penyaluran bantuan langsung tunai dana desa tahap I, banyak pemerintah desa yang belum menyalurkan BLT Dana Desa tersebut karena masih saling menunggu himbauan dari pemerintah kabupaten Mojokerto.

“ Hanya, sampai saat ini belum ada pemdes yang berani menyalurkan BLT. Meski sebagian besar telah mendata dan menetapkan dalam musdes. ”Ya itu tadi (kemarin, Red) kami harus hati-hati karena penerima nggak boleh tumpang tindih. Kita lebih baik menunggu data verifikasi BLT yang dari pusat dan pemda. Baru setelah itu BLT DD bisa disalurkan,” pungkasnya”.

<https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2020/05/06/192597/pemerintah-desa-belum-salurkan-blt-dari-dana-desa> (diakses pada 09 maret 2021, pukul 13.15 WIB)

Dengan begitu penyaluran BLT Dana Desa mengalami keterlambatan hingga beberapa minggu, hal tersebut senada dengan perkataan yang dilontarkan salah satu pegawai pemerintah Kabupaten Mojokerto yang bertugas dalam penyaluran bantuan sosial.

” Dari Kemendes PDTT, targetnya memang awal Meikemarin. Namun, karena proses pendataannya yang telat, akhirnya baru minggu kedua bisa tersalurkan. Saat ini semua desa diperintahkan untuk

dipercepat penyalurannya sebelum hari raya,” ungkap Mujib. (<https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2020/05/19/194973/blt-dd-di-299-desa-sentuh-27-ribu-kepala-keluarga> diakses 09 maret 2021 pukul 13.20 WIB)

Masalah ini tidak sesuai dengan pendapat Abdurahmat dalam Othenk (2008:7) yang menyebutkan efektivitas yaitu pemanfaatan Sumber daya yang ada dan juga sarana prasaran dengan jumlah tertentu yang ditetapkan untuk menghasilkan sebuah pekerjaan yang tepat dan dapat selesai tepat waktu. Selain masalah ketepatan waktu, masih ada beberapa masalah lain yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial langsung tunai dana desa tersebut. Adapun masalah lain yaitu masalah dalam menentukan sasaran masyarakat penerima bantuan tersebut. Hal tersebut sependapat dengan Budiani (2007) yang mengatakan bahwa pengukuran efektivitas program dapat dilihat dari variabel ketepatan sasaran program. Dimana dalam hal ini diperlukan data yang valid untuk menentukan siapa saja sasaran dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

“Setidaknya ada 27 ribu kepala keluarga (KK) dari 299 desa yang bakal menerima manfaat bantuan yang bersumber dari anggaran desa tersebut. Mereka adalah keluarga hasil usulan dari RT/RW yang disepakati pemdes setempat. “.

(<https://radarmojokerto.jawapos.com/read/2020/05/19/194973/blt-dd-di-299-desa-sentuh-27-ribu-kepala-keluarga> diakses 09 Maret 2021 pukul 13.20WIB)

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), efektivitas dapat dilihat dari ketetapan waktu pemberian bantuan, ketepatan sasaran, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berfikir, ketepatan dalam melakukan

perintah, dan ketepatan menentukan tujuan. Jadi efektivitas merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan baik sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan.

Di Desa Pulorejo sendiri program Bantuan Langsung Tunai ini tidak berjalan efektif dimana masih terdapat berbagai macam masalah dalam pelaksanaannya seperti pada sasaran yang dituju, apa saja kriteria penerima BLT-DD, bagaimana proses pendataan yang dilakukan untuk penerima BLT-DD, bagaimana mengadu jika ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan BLT-DD tetapi tidak mendapatkan dan sebaliknya, apakah bisa pemerintah melakukan pemotongan besaran BLT-DD guna mensama-ratakan semua masyarakat agar menerima bantuan dan masih banyak lainnya. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis sebelumnya di lapangan ditemukan masih adanya permasalahan dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan tersebut, dikarenakan tidak adanya data yang akurat dalam menentukan siapa yang berhak dan layak menerima bantuan tersebut, dan tidak adanya transparansi kepada masyarakat baik secara online melalui website ataupun offline.

Tabel 1.1.

Jumlah penerima BLT-DD tiap desa

No	Nama Desa	Jumlah Penerima BLT-DD
1	Pulorejo	85 orang
2	Banyulegi	70 orang

3	Jatirowo	60 orang
---	----------	----------

Sumber: hasil observasi penulis

Berdasarkan data yang ada dapat dijelaskan bahwa Desa Pulorejo merupakan salah satu desa yang mendapat jumlah kuota penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang cukup banyak, yaitu sejumlah 85 kepala keluarga. Berdasarkan data yang diterima penulis dari pihak desa jumlah penerimatersebut lebih banyak dibandingkan jumlah penerima bantuan di desa Banyulegi kecamatan Dawarblandong yang berjumlah 70 kepala keluarga berdasarkan halaman website Desa Banyulegi. Dimana dalam keadaan geografis maupun sosial masyarakat desa Pulorejo dapat dikatakan sedikit lebih baik daripada desa Banyulegi. Selain kedua desa tersebut, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa jatirowo menyebutkan bahwa jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa di desa jatirowo sebanyak 60 orang pada tahap pertama sampai ketiga, 60 orang pada tahap keempat sampai keenam dan 35 orang pada tahap ketujuh sampai kesembilan. Berdasarkan data tersebut desa Pulorejo merupakan salah satu desa yang mendapatkan kapasitas atau jumlah penerima bantuan langsung tunai terbanyak di kecamatan Dawarblandong, dengan adanya data tersebut bisa saja dalam penentuan penerima bantuan tersebut dapat terjadi penyelewengan dikarenakan desa Pulorejo merupakan pusat dari kecamatan dawarblandong.

Perlu adanya tindak lanjut dari masalah diatas yaitu mengenai keefektivitas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tersebut. dalam

mengukur efektivitas program dalam jurnal (Nadira dkk, 2019) Menurut Makmur (2011:7-9) bahwa indikator efektivitas dapat diukur dari beberapa kriteria, yaitu:

- a. Ketepatan waktu
- b. Ketepatan perhitungan biaya
- c. Ketepatan dalam pengukuran
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan
- e. Ketepatan berfikir
- f. Ketepatan melakukan perintah
- g. Ketepatan menentukan tujuan
- h. Ketepatan sasaran

Sedangkan dalam jurnal (melati, 2021) Budiani (2007) menyatakan bahwa dalam pengukuran efektivitas program dapat diukur menggunakan indikator atau variabel berikut ini:

- a. Ketepatan Sasaran Program, Pemahaman program dalam hal ini sejauh mana peserta rogram benar pada target yang telah ditentukan.
- b. Sosialisasi Program, Kemampuan pelaksanaan program dalam menyampaikan informasi kegiatan program yang dijalankan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat mengerti maksud dan tujuan program.
- c. Tujuan Program, Tujuan program yaitu sejauhmana hasil pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

- d. Pemantauan Program, Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti ingin mengkaji dan meneliti tentang efektivitas bantuan yang diberikan pemerintah terutama pada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Pulorejo Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Adapun Tujuan dilakukannya penelitian ini guna mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Pulorejo Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat terdampak Covid-19 di desa Pulorejo Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto?

1.3. Tujuan Penelitian

untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Desa Pulorejo Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik bagi penulis maupun pihak lain.

Berikut manfaat dari penelitian ini antara lain:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan mengembangkan konsep efektivitas kebijakan pemerintah terutama dalam kebijakan bantuan sosial.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan menambah pengetahuan yang mendalam mengenai terkait efektivitas bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di desa Pulorejo Kecamatan Dawaeblandong Kabupaten Mojokerto.

1.4.2.2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Untuk menambah referensi dan Literature pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang akan dilakukan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.4.2.3. Bagi Desa Pulorejo Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto

Sebagai bahan evaluasi terhadap bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat untuk mengetahui efektivitas bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di desa Pulorejo Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.